



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0032/Pdt.P/2014/PA Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/isbat nikah yang diajukan oleh

ABDUL KARIM KODI BIN RIDWAN, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di jln. Kampung Ende, Desa Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DAN

ARFAH BINTI ABDURRAHMAN, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Kampung Ende Desa Kota Ndora, Kecamatan, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA Rtg, mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 29 Mei 2008 di rumah orang tua Pemohon I, di Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, dengan wali nikah ayah kandung bernama; ABDURRAHMAN, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000 dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama; IBRAHIM SUMAN DAN ALI PUA NGGALO.

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum, Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: MUHAMMAD ARJUN BIN ABDUL KARIM KODI dan EKA SAFITRI WATI BINTI ABDUL KARIM KODI.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Buku Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2008 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2008 di wilayah Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
- 3 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA Rtg, Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama:

1. USMAN LEFU BIN LEFU, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ende Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.YUSUF IBU BIN IBU , umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Ende Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Dan keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapnya telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak akan menambah saksi-saksi lagi dan berkesimpulan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, agar pernikahan diisbatkan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, karena pernikahan tidak tercatat dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, sebelum menikah Pemohon I berumur 40 tahun berstatus jejaka, dan Pemohon II, berumur 21 tahun berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2008 di rumah orang tua kandung Pemohon I di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ABDURRAHMAN (orang tua kandung Pemohon II), mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada

Pemohon II berupa uang Rp. 5000, dibayar dengan tunai, disaksikan oleh IBRAHIM

SUMAN dan ALI PUA NGGALO.



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah, pertalian kerabat, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan, tidak terhalang baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketereangan saksi-saksi tersebut, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara sah menurut hukum dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang adanya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai orang anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat pakai untuk mempertimbangkan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak dan berumur 40 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 21 tahun.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2008 rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ABDURRAHMAN (orang tua kandung Pemohon II), mahar berupa seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat, dan saksi-saksi, IBRAHIM SUMAN dan ALI PUA NGGALO, pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda, dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi syarat secara syar'i.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah agar pernikahannya dicatat secara hukum, dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, dapat diperoleh peristiwa hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum syar'i yaitu adanya calon kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi-saksi dan terjadinya proses ijab qabul, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengambil pendapat Ulama sebagai dalil untuk menguatkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu sebagai berikut:

“Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut darti umpunya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I’ناه at-Thalibin IV: 254).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis ketentuan Pasal 49 angka

(22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA Rtg, untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (ABDUL KARIM KODI BIN RIDWAN) Pemohon II (ARFAH BINTI ABDURRAHMAN) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I (ABDUL KARIN KODE BIN RIDWAN) dengan Pemohon II (ARFAH BINTI ABDURRAHMAN).

- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini di Reok, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. MUSLIM, M.H, sebagai Ketua Majelis, dengan, didampingi oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Drs. MUSLIM,M.H.

Panitera,

TTD

INSANI MIRATILLAH INDA SELA,S.Ag.

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000
2	Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 240.000
3		
	Biaya Materai	Rp. 6.000
	Jumlah	Rp. 400.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)